

BAB V

PENUTUP

1. Kesimpulan

Dalam bab ini penulis akan membahas mengenai kesimpulan mengenai perlindungan penyandang disabilitas fisik pasca terjadinya eksploitasi berdasarkan dengan UU No. 8/2016 dan juga CRPD sebagaimana yang telah dijabarkan sebelumnya. Penulis menyimpulkan bahwa:

1. Meski terlihat berbeda dengan individu lainnya, penyandang disabilitas fisik memiliki kedudukan dan hak-hak yang sama dengan individu lain dan hak-hak tersebut tidak dapat diabaikan. Namun, pada kenyataannya penyandang hak-hak dari penyandang disabilitas fisik masih banyak diabaikan dan penyandang disabilitas fisik masih sulit untuk mendapatkan hak-haknya karena penyandang disabilitas seringkali mendapatkan ancaman-ancaman. Salah satu ancaman yang diterima oleh penyandang disabilitas fisik dijadikan objek eksploitasi oleh oknum-oknum yang berniat memanfaatkan kekurangan penyandang disabilitas fisik agar mendapatkan keuntungan. Kegiatan eksploitasi terhadap penyandang disabilitas fisik dapat melahirkan dampak-dampak yang negatif baik dampak psikis maupun dampak fisik. Dampak yang hadir pasca terjadinya eksploitasi dapat menghambat penyandang disabilitas fisik untuk mempertahankan kehormatan atas hak-hak yang penyandang disabilitas fisik miliki. Oleh karena itu, Pemerintah memiliki kewajiban untuk melindungi hak-hak seluruh masyarakat termasuk hak-hak dari penyandang disabilitas fisik. Salah satu upaya pemerintah dalam melindungi penyandang disabilitas fisik dengan mengesahkan UU No. 19/2011 tentang Konversi Hak-Hak Penyandang Disabilitas, UU No. 8/2016 tentang Penyandang Disabilitas, Perpres No. 75 Tahun 2005 yang mengatur mengenai mandat pelaksanaan aksi-aksi di bidang

penyandang disabilitas. Karena Indonesia menjadi salah satu negara yang menyetujui CRPD perlu untuk memenuhi seluruh hak dan kewajiban sesuai dengan ketentuan yang ada dalam CRPD. Begitu pula dalam peraturan mengenai penyandang disabilitas baik yang sudah disahkan maupun yang akan disahkan perlu untuk diharmonisasikan dengan CRPD; dan

2. Untuk memaksimalkan peraturan yang sudah diciptakan untuk melindungi penyandang disabilitas fisik, Pemerintah ditugaskan untuk melaksanakan program-program. Namun program-program yang telah dituangkan dalam yang telah dituangkan dalam RPJMN belum sepenuhnya dilaksanakan dengan maksimal. Terutama pada penyandang disabilitas fisik yang menjadi korban dari eksploitasi. Perlindungan yang diberikan oleh Pemerintah baik dalam bidang peraturan maupun dalam upaya dalam memaksimalkan peraturan seperti memberikan perlindungan dengan menyediakan sarana atau prasarana habilitas dan rehabilitas bagi penyandang disabilitas fisik yang menjadi korban dari eksploitasi masih sangat minim. Dampak-dampak eksploitasi yang hadir dalam kehidupan penyandang disabilitas fisik masih sangat diabaikan.

2. Saran

Dengan adanya kesimpulan yang ditarik berdasarkan apa yang sudah dijabarkan sebelumnya, beberapa saran mengenai perlindungan penyandang disabilitas fisik pasca terjadinya eksploitasi yang dapat diajukan oleh penulis adalah sebagai berikut:

- ii. Untuk meningkatkan komitmen negara dalam melindungi penyandang disabilitas fisik pasca terjadinya eksploitasi diperlukannya peran Pemerintah dan Pemerintah Daerah dalam memaksimalkan implementasi efektivitas dari UU No. 8/2016 tentang Penyandang Disabilitas dan juga CRPD.

Serta Komnas Disabilitas perlu memaksimalkan tugasnya dalam melakukan perlindungan dan pemenuhan hak dari penyandang disabilitas. Pemerintah dan Pemerintah Daerah perlu mengatur mengenai perlindungan terhadap penyandang disabilitas pasca terjadinya eksploitasi memerlukan peraturan yang lebih khusus sebagaimana yang dituangkan di dalam CRPD. Serta Komnas Disabilitas perlu memaksimalkan tugasnya dalam melakukan perlindungan dan pemenuhan hak dari penyandang disabilitas;

- iii. Untuk memaksimalkan implementasi efektivitas dari peraturan yang sudah ada perlu adanya dukungan dengan merencanakan dan melaksanakan program-program seperti rehabilitasi atau unit pelayanan yang khusus bagi penyandang disabilitas fisik korban eksploitasi. Program-program perlindungan penyandang disabilitas fisik pasca terjadinya eksploitasi perlu untuk direalisasikan, dalam RPJMN yang akan diperbaharui perlu untuk memasukan mengenai RPP Unit Layanan Disabilitas dan menambahkan poin mengenai bantuan pemulihan bagi penyandang disabilitas fisik yang menjadi korban eksploitasi.

DAFTAR PUSTAKA

PERUNDANG-UNDANGAN

Convention On The Rights of Persons With Disabilities (CPRD)

Undang-Undang Dasar 1945

Undang Undang Dasar Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan Konvensi mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas.

Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2020 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 52 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial bagi Penyandang Disabilitas.

BUKU

Ashar, Dio, Ashila, Inatsan Bestha dan Pramesta, Nadia Gita. *Pandangan Penanganan Perkara Penyandang Disabilitas Berhadapan Dengan Hukum*. Jakarta: MaPPI FHUI, 2019.

Donenely, Jack, "*Universal Human Rights in Theory and Practice*." Cornell University Press, Ithaca and London, 2003. hlm. 7.

Hardani. *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*. Yogyakarta: CV. Pustaka Ilmu, 2020.

Latief Syahbuddin M, *Jalan Kemanusiaan, Panduan untuk Memperkuat Hak Asasi Manusia*. Yogyakarta: Laper Pustaka Utama, 1999.

Marzuki, Peter Mahmud, "*Pengantar Ilmu Hukum*", Kencana Media Grup, Jakarta, 2008.

Rahardjo, Satjipto, *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.

- Rahardjo, Satjipto, *Permasalahan Hukum di Indonesia*. Bandung: Alumni, 1983.
- Sepijo, Pandi, “Pendidikan Pancasila.” Edisi keempat (Jakarta, PT Grasindo, 2011).
- Soekanto, Soerjono, dan Madmuji, Sri. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013.
- Sutoyo, “*Studi Komparatif Tentang Perlindungan Hak Asasi Manusia Dalam UUD 45 dan Hukum Islam*.” Cetakan I (Yogyakarta, Stain Po press, 2013)
- Utomo, Sad Dian, Fajri Nur Syamsi, Ermy Ardhyanti, Fitria, “*Mewujudkan Pembangunan Inklusif Disabilitas: Rekomendasi Kebijakan untuk Penyusunan RPJMN 2020-2024*.” Jakarta Selatan: PATTIRO, 2019.
- Quinn, Gerard, and Degener, Theresia. *Human Rights and Disability: The Current Use and Future Potential of United Nations Human Rights Instruments in the Context of Disability*. New York: United Nations Office of the High Commissioner for Human Rights, 2002.

JURNAL

- Arestein-Kerslake, Anna. “*Disability Human Rights Law*.” MDPI: Journal Laws, (2016), 2.
- Fajar. “*Pemenuhan Hak-Hak Kaum Difabel Dalam Kerangka Hak Azasi Manusia*.” PALITA: *Journal of Social-Religion Research* Vol.4, No. 2 (2019), 153.
- Harahap, Repindowaty Rahayu dan Bustanuddin. “*Pelindungan Hukum Terhadap Penyandang Disabilitas Menurut Convention On The Rights of Persons With Disabilities (CPRD)*.” Jurnal Inovatif Vol. 8, No. 1 (2015), 21.
- Khusrotin, Heni Fatun. “*Eksplorasi Penyandang Disabilitas dalam Perspektif Hukum Etika Media*.” *Commercium*, Volume 01, No. 02 (2019). 48-49
- Mulyani, Khofifah, Muhammad Sahrul, Alfian Ramdoni, “*Ragam Diskriminasi Penyandang Disabilitas Fisik Tunggal Dalam Dunia Kerja*” Khidmat

Sosial: *Journal of Social Work and Social Services* Vol. 3, No. 1 April (2022), 12-13

Pawestri, Apriliana, "Hak Penyandang Disabilitas Dalam Perspektif HAM Internasional dan HAM Nasional." *Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum* Vol. 2, No. 1 (2017), 173.

Rahmawan, Aried, Sugion dan Ilhamuddin. "*Klasterisasi Mahasiswa Didabel Indonesia berdasarkan Background Histories dan Studying Perfomance*" *Indonesia Journal of Disabillity Studies* 20 (2014), 21.

Rendi, Asri, Iga Maligam Nurarifatus S. "*Konsturuksi Perlindungan Penyandang Disabilitas Mental Dalam Instrumen Hak Asasi Manusia.*" *Jurnal Ilmiah Mandala Education (JIME)* col. 9, No. 2 (2023), 1448-1449.

Ridlwan, Zulkarnain. "Perlindungan Hak-Hak Konstitusi Penyandang Disabilitas (Rights Of Persons With Disabilities)." *Fiat Justisia Ilmu Hukum* Volume 7, No. 2 (Mei-Agustus 2013), 236.

Sakinah, Iik, Slamet Muchsin, Suyeno, "*Implementasi Peraturan Daerah Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Penyandang Disablitas (Studi Pada Rehabilitasi Sosial Disabilitas Kota Malan.*" *Jurnal Respon Publik*, Vol 14, No.3 (2020), 46-47.

Situngkir, Danel Aditia, "*Terikatnya Negara Dalam Perjanjian Internasional.*" *Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum* Vol. 2, No. 2, (2018), 174.

Sodiqin, Ali. "*Amibuitas Perlindungan Hukum Penyandang Disabilitas Dalam Perundang-Undangan di Indonesia.*" *Jurnal Legislasi Indonesia* Vol 18, No.1 (Maret 2021), 35.

Sudrajatm Shinta Azzahra, "*Hak Asasi Manusia (HAM) sebagai Bentuk Kebijakan Politik dalam Pelaksanaan Perlindungan.*" *Definisi: Jurnal Agama dan Sosial-Humaniora*, Volume 1 , No, 1 (2021), 18.

Widinarsih, Dini. "*Penyandang Disabilitas di Indonesia: Perkembangan Istilah dan Definisi.*" *Jurnal Ilmu Kesehatan* Jilid 20, No.2 (Oktober 2019), 139.

PUBLIKASI LAINNYA

Ahdiat, Adi, “*Ada 1,3 Miliar Penyandang Disabilitas, Ini Raga Kondisi Kesehatannya.*” Databoks Katadata <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/12/13/ada-13-miliar-penyandang-disabilitas-ini-ragam-kondisi-kesehatannya> diakses pada 14 Mei 14.04.

Alfisahrin, “*Politik Kecacatan: Diskriminasi, Stereotipe dan Eksploitasi Penyandang Cacat dalam Pembangunan*” Lembaga Pengembangan Wilayah Nusa Tenggara Barat, <https://www.lpwntb.or.id/politik-kecacatan-diskriminasi-stereotipe-dan-eksploitasi-penyandang-cacat-dalam-pembangunan/>, diakses pada 8 April 2023 pukul 14.33.

Asri, Misran, “*Pria Cacar Leher di Simpang BPKP Disuruh Mengemis oleh Keluarga, Joki Lebih Banyak Dapat Bagian.*” Tribun News, <https://aceh.tribunnews.com/2018/10/23/pria-cacat-leher-di-simpang-bpkp-disuruh-mengemis-oleh-keluarga-joki-lebih-banyak-dapat-bagian> diakses pada 8 Mei 2023 pukul 22.24.

BNPB, “*Perka BNPB No. 14/2014 tentang Penanganan, Perlindungan, dan Partisipas Penyandang Disabilitas dalam PB.*” Badan Nasional Penanggulangan Bencana, <https://bnpb.go.id/berita/perka-bnpb-no-14-2014-tentang-penanganan-perlindungan-dan-partisipasi-penyandang-disabilitas-dalam-pb#:~:text=Hak%20pelindungan%20dari%20bencana%20untuk,dan%20evakuasi%20dalam%20keadaan%20bencana>. diakses pada 27 Maret 2023 pukul 12.25.

Destina, Winda, “*Ini Faktor Penyebab Tingginya Angka Disabilitas di Indonesia.*” Republika.com, diakses pada 19 Maret 2023 pukul 20.28 <https://www.republika.co.id/berita/nvcoog359/ini-faktor-penyebab->

[tingginya-angka-disabilitas-di-indonesia](#) diakses pada 19 Maret 2023 pukul 20.28

Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, “*Jumlah Penduduk Disabilitas Berdasarkan Jenis Kelamin di Jawa Barat.*” Kementerian PPN/Bappenas. <https://opendata.jabarprov.go.id/id/dataset/jumlah-penduduk-disabilitas-berdasarkan-jenis-kelamin-di-jawa-barat>, diakses pada 3 Desember 2022, pukul 23.28.

FAT, “*Instrumen Pengumpulan Data Penyandang Disabilitas Diluncurkan*” Hukum Online, <https://www.hukumonline.com/berita/a/instrumen-pengumpulan-data-penyandang-disabilitas-diluncurkan-lt536a18b9c0208/#!> diakses pada 26 Maret 2023.

Humas BRIN, “*Pemerintah Peduli pada Penyandang Disabilitas melalui Program peningkatan Fungsi Sosial.*” BRIN, <https://www.brin.go.id/news/107231/pemerintah-peduli-pada-penyandang-disabilitas-melalui-program-peningkatan-fungsi-sosial> diakses pada 26 April 2023 pukul 12.45.

Humas Fraksi PKS, “*Peringatan Hari Disabilitas, Bukhori Serahkan Bantuan bagi Penyandang Disabilitas di Dapil.*” PKS, <https://fraksi.pks.id/2021/12/07/peringati-hari-disabilitas-bukhori-serahkan-bantuan-bagi-penyandang-disabilitas-di-dapil/> diakses pada 8 Mei 2023.

Indonesia, CNN, “*Bocah Penyandang Disabilitas Sentuh Hati Polisi*” Youtube, diunggah oleh CNN Indonesia, 23 Juli 2021, <https://youtu.be/LoYTdj0Iihc>

Indrianti, Rifani, “*Hak Penyandang Disabilitas Diatur Undang-Undang.*” Indonesiabaik.com <https://indonesiabaik.id/infografis/hak-penyandang-disabilitas-diatur-undang-undang-1> diakses pada 13 Mei 2023 pukul 23.37.

KBBI, “*Pengertian Eksploitasi*”. <https://kbbi.web.id/eksploitasi>, diakses pada tanggal 27 Oktober 2022, pukul 15.33.

KBBI, “*Pengertian Privasi*”. <https://kbbi.web.id/privasi>, diakses pada 27 Maret 2023, pukul 10.24.

Kemenkumham, “*Artikel Hukum Tata Negara dan Peraturan Perundang-Undangan.*” Kemenkumham, https://ditjenpp.kemenkumham.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=2941:hak-politik-warga-negara-sebuah-perbandingan-konstitusi&catid=100&Itemid=180&lang=en, diakses pada 27 Maret 2023 pukul 10.37.

KLA, “*Kondisi Korban Perdagangan Orang.*” KLA.com <https://www.kla.id/kondisi-korban-perdagangan-orang/> diakses pada 6 Juli 2023.

Komnas HAM, “*Kerangka Analisis untuk Mengitergrasi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) dengan Kewajiban Pemenuhan Hak-hak Asasi Manusia untuk di Indinonesia, Mengurangi Keimpangan di Dalam dan Antar Negara*”, Komnas HAM, , <https://sdg.komnasham.go.id/sdg-content/uploads/2017/04/Tujuan-10.pdf> diakses pada 14 September 2022, pukul 21.44.

Laily, Iftitah Nurul, “*Pengertian Warga Negara Beserta Hak dan Kewajibannya.*” kedata.co.id, <https://katadata.co.id/intan/berita/6205fe4fc4143/pengertian-warga-negara-beserta-hak-dan-kewajibannya> diakses pada 27 Maret 2023 pukul 10.55.

Maulana, Kemal, “*Pengertian, Jenis & Dampak Eksploitasi Anak Menurut UU No. 35 Tahun 2014.*” hallo.id, <https://www.hallo.id/lifestyle/pr-286581422/pengertian-jenis-dampak-eksploitasi-anak-menurut-uu-no-35-tahun-2014?page=2> diakses pada 28 Mei 2023 pukul 21.46.

Paula, Baim, “*Aldi Penyandang Disabilitas, Dikasih Duit Malah Balik Marah*”, Youtube, diunggah oleh Baim Paula, 14 Februari 2023, <https://youtu.be/PUxiVRe-H2A>

Paula, Baim, “*Dikira Mau Minta2... Penderita Disabilitas ini Malah Kasih Uang... Baim Mau Balikin, Dia Ga Mau*” Youtube, diunggah oleh Baim Paula, 9 April 2021, <https://youtu.be/vghjH6qUIus>

Pratiwi, Ryan Sara, “*Media Kerap Eksploitasi Kesedihan Penyandang Disabilitas.*” Gantra.com <https://www.gatra.com/news-460067-gaya-hidup-media-kerap-eksploitasi-kesedihan-penyandang-disabilitas.html> diakses pada 5 Juli 2023 pukul 13.29.

PSHK, “*Habilitas dan Rehabilitas Penyandang Disabilitas Secara Wajar Dalam Kehidupan Masyarakat.*” <https://pshk.or.id/dokumen/4174#:~:text=Habilitasi%20dan%20Rehabilitasi%20Penyandang%20Disabilitas,secara%20wajar%20dalam%20kehidupan%20masyarakat>. diakses pada 27 Maret 2023 pukul 12.32.

PTM Kabupaten Pringsewu, “*Dampak Pencemaran Udara (Polusi Udara) Terhadap Penyakit Hipertensi*”, Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, [https://p2ptm.kemkes.go.id/post/dampak-pencemaran-udara-polusi-udara-terhadap-penyakit-hipertensi#:~:text=Pencemaran%20udara%20memiliki%20dampak%20terhadap,hipertensi%20\(tekanan%20darah%20tinggi\)](https://p2ptm.kemkes.go.id/post/dampak-pencemaran-udara-polusi-udara-terhadap-penyakit-hipertensi#:~:text=Pencemaran%20udara%20memiliki%20dampak%20terhadap,hipertensi%20(tekanan%20darah%20tinggi)). diakses pada 26 April 2023 pukul 13.32.

Rahmawati, Andily Aprilia, “*SUARA SETARA: Pelaku Kekerasan Seksual pada Warga Difabel kerap Lolos, karena Kesaksian yang Kurang Valid atau Sistem Hukumnya tidak Inklusif?*” BandungBergerak.id <https://bandungbergerak.id/article/detail/15577/suara-setara-pelaku-kekerasan-seksual-pada-warga-difabel-kerap-lolos-karena-kesaksian-yang-kurang-valid-atau-sistem-hukumnya-tidak-inklusif> diakses pada 5 Juli 2023

Rizka, Rina, “*Perlindungan Hukum Terhadap Eksploitasi Penyandang Disabilitas di Banda Aceh (Studi Qanun Nomor 11 Tahun 2013 tentang Kesejahteraan Sosial dan Hukum Islam)*”, hlm. 51-56.

Sahbani, Agus, “*Mengintip 9 Aturan Turunan UU Penyandang Disabilitas.*” Hukumonline, <https://www.hukumonline.com/berita/a/mengintip-9-aturan-turunan-uu-penyandang-disabilitas-lt5fc7817a40ecb> diakses pada 27 April 2023 pukul 13.45.

Sistem Perlindungan Anak Berkebutuhan Khusus, “*Pengertian, Jenis, dan Hak Penyandang Disabilitas. “Sistem Perlindungan Anak Berkebutuhan Khusus - Perlindungan Anak Kelompok Minoritas dan Penyandang Disabilitas.”* <https://spa-pabk.kemenpppa.go.id/index.php/perlindungan-khusus/anak-penyandang-disabilitas/723-penyandang-disabilitas> diakses pada 19 Maret 2023 pukul 21.27.

Sirtupillaili, “*Dosen Hukum universitas Mataram Menilai Menikahkan ODGJ Bentuk Eksploitasi dan Kekerasa Seksual.*” Trubunnews.com, <https://lombok.tribunnews.com/2021/08/27/dosen-hukum-universitas-mataram-menilai-menikahkan-odgj-bentuk-eksploitasi-dan-kekerasan-seksual> diakses pada 5 Juli 2023 pukul 11.27.

Sudarwati, Erlin, “*Artikel Kebijakan Penyandang Disabilitas*”, KEMHAN, <https://www.kemhan.go.id/pusrehab/2016/11/24/artikel-kebijakan-penyandang-disabilitas.html> diakses pada 19 Maret 21.45

Sudawarti, Erlin, “*Kebijakan Penanganan Penyandang Disabilitas Personel KEMHAN dan TNI*”, KEMHAN, 24 November 2016, <https://www.kemhan.go.id/pusrehab/2016/11/24/artikel-kebijakan-penyandang-disabilitas.html> diakses pada 21 September 2022.

Sudarwati, Erlin, “*Kebijakan Penanganan Penyandang Disabilitas Personel KEMHAN dan TNI*”, KEMHAN, <https://www.kemhan.go.id/pusrehab/2016/11/24/artikel-kebijakan-penyandang-disabilitas.html> diakses pada 21 September 2022.

Viola, Safhira, “*UU Disabilitas: Apa Saja Hak-Hak Penyandang Disabilitas?*” jalastoria.id <https://www.jalastoria.id/uu-disabilitas-apa-saja-hak-hak-penyandang-disabilitas-2/> diakses pada 23 Maret 2023 pukul 21.37.

Widodo, Bambang, "*Upaya Memenuhi Hak Penyandang Disabilitas.*" HAM <https://ham.go.id/2020/03/06/upaya-memenuhi-hak-penyandang-disabilitas/> diakses pada 13 Mei 2023 pukul 23.52.